

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA 2023**

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya ***Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.***

Pada dasarnya Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Lingkungan Hidup sejak terbentuk pada tanggal 10 Januari 2020 sampai sekarang (triwulan II).

Namun sebagai salah satu bagian dari sistem perencanaan daerah, maka Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup juga menggambarkan perencanaan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sejalan dengan RPJMD Kab. Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (RENJA) merupakan rencana kerja tahunan yang dibuat untuk menunjang Visi dan Misi Dinas khususnya dan Kabupaten Sidenreng Rappang Umumnya. Renja ini pula nantinya yang terangkum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidrap dan menjadi acuan setiap sektor/bidang lingkup Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2023.

Semoga dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ini, seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pangkajene Sidenreng, 17 Juli 2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG., MT**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip 19690507 199903 1 010

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b><br>.....   | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>01</b> |
| I.1 LATAR BELAKANG .....   | 01        |
| I.2 LANDASAN HUKUM .....   | 02        |
| I.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....  | 04        |
| I.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....  | 04        |
| <b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN</b>              | <b>07</b> |
| II.1 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II<br>TAHUN 2023 ..... | 07        |
| II.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT<br>DAERAH .....    | 28        |
| <b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....                  | <b>29</b> |
| III.1 PROGRAM DAN KEGIATAN .....   | 29        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....  | <b>60</b> |



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan disusun sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tujuan untuk koordinasi antar pelaku, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang.

Perencanaan yang strategis diperlukan dalam menetapkan program maupun kegiatan yang akan direalisasikan di tahun ini. Rencana Kerja (Renja) disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam memasukkan program/kegiatan ke dalam KUA dan PPAS. Renja juga merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Perubahan atas rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya di latar belakang oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dan perubahan ini juga turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan suatu kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan hukum agar kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun alasan hukum dalam penyusunan perubahan renja adalah:

- a) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir =dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- h) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- i) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 2019 Nomor 6);
- j) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- k) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas.
- l) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor XX Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan rencana kerja di tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menyesuaikan adanya perubahan dari rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari segi program, kegiatan maupun target kinerjanya, Sehingga tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup bisa terealisasi dengan optimal.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Urusan /bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dengan format tabel III.1.

#### BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup ini menyajikan hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2023 terdiri dari 3 Program, 5 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar **Rp. 13.398.232.000,-** dengan rincian belanja Pegawai sebesar **Rp. 3.606.928.000,-** belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 8.600.984.900,-** dan belanja modal **Rp. 1.735.746.100,-**

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terdiri :

#### **1. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 50%.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 25%.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 20%.

- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 20%
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 35%
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 40%
- 7) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0,25%
- 8) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- 9) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 40%
- 10) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- 11) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0,32%
- 12) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan target 100% yang terealisasi 25%

- 13) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 24%
- 14) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 30%
- 15) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH dengan kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan target 100% yang terealisasi 45%
- 16) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- 17) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan target 60% yang terealisasi 48%
- 18) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah dengan target 72% yang terealisasi 45%

**2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu:**

Adapun realisasi Program/Kegiatan/Sub Keegiatanyang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dirancakan sampai triwulan II belum ada.

**3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :**

Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II belum ada.

**4. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:**

- 1) Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program/kegiatanannya.
- 2) Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
- 3) Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
- 4) Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

**5. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD**

Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 yaitu :

- a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
- b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.

**6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu:**

- a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
- b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
- c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
- d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Adapun pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

**Tabel II.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 (Tahun Berjalan)**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja capaian program (Renstra Pertangkat Daerah ) s/d Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023 |                                   |                       | Perkiraan Realisasi Capaian Targer Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|------|---|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|
|      |   |                                      |  |   | Target Renja Perangkatt Daerah   | Realisaii Renja Perangkatt Daerah | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2   | 3                                    | 4  | 5   | 6  | 7                                 | 8=(7/6)               | 9=5+7)   | 10=9/4*100 )                                 |
| 2    |   |                                      |  |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR        |                                   |                       |  |  |
| 2    | 1<br>1  |                                      |  |   |  |                                   |                       |  |  |
|      |   |                                      |  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                  |                                   |                       |  |  |

|   |        |        |          |        |  |   |     |     |     |    |     |     |     |
|---|--------|--------|----------|--------|--|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 |          |        | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     | <b>Cakupan ketersediaan<br/>pelayanan administrasi<br/>penunjang Urusan<br/>Pemerintahan</b>                      | 100 | 100 | 100 | 50 | 50  | 100 | 100 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>1 |        | <b>Perencanaan, Penganggaran<br/>dan Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b> | <b>Tersedianya Dokumen<br/>perencanaan yang di hasilkan</b>   | 100 | 100 | 100 | 50 | 50  | 100 | 100 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>1 | 0<br>1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                          | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | 9   | 3   | 3   | 1  | 0.3 | 4   | 44  |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>1 | 0<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                        | 3   | 3   | 1   | 1  | 1   | 4   | 100 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>1 | 0<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD | 6   | 2   | 2   | 1  | 0,5 | 3   | 100 |

|   |        |        |          |        |   |  |     |     |     |    |     |     |      |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>1 | 0<br>4 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 3   | 1   | 1   | 1  | 1   | 2   | 33.3 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>1 | 0<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 6   | 2   | 2   | 0  | 0   | 2   | 100  |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>1 | 0<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15  | 5   | 5   | 1  | 0,2 | 6   | 40   |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>2 |        | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Presentase Laporan Administrasi Keuangan</b>  | 100 | 100 | 100 | 25 | 25  | 100 | 100  |

|   |        |        |          |        |   |  |      |     |     |    |      |     |     |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|------|-----|-----|----|------|-----|-----|
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>2 | 0<br>1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2800 | 12  | 14  | 3  | 0,53 | 15  | 233 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>2 | 0<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3    | 7   | 1   | 0  | 0    | 7   | 233 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>2 | 0<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 60   | 13  | 20  | 5  | 0,25 | 18  | 30  |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>6 |        | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     |  | 100  | 100 | 100 | 20 | 20   | 100 | 100 |

|          |          |          |            |   |   |  |            |            |            |           |            |            |            |
|----------|----------|----------|------------|---|---|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 2        | 1        | 0        | 2.0        | 0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 453        | 151        | 151        | 9         | 0,05960265 | 160        | 714        |
| 2        | 1        | 0        | 2.0        | 0 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar Daerah                  | 600        | 135        | 200        | 30        | 0,58       | 165        | 314        |
| <b>2</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>2.0</b> |   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>20</b> | <b>20</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 2        | 1        | 0        | 2.0        | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 30         |            | 10         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| <b>2</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>2.0</b> |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>35</b> | <b>35</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 2        | 1        | 0        | 2.0        | 0 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1050       |            | 350        | 50        | 0,143      | 100        | 28,57      |
| 2        | 1        | 0        | 2.0        | 0 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 36         | 12         | 12         | 3         | 0,25       | 15         | 41         |

|   |   |   |     |   |  |  |     |     |     |    |      |     |     |
|---|---|---|-----|---|--|--|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 36  | 12  | 12  | 3  | 0,25 | 15  | 41  |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  | 100 | 100 | 100 | 40 | 40   | 100 | 100 |
|   |   |   |     |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 100 | 12  | 100 | 0  | 0    | 12  | 12  |
|   |   |   |     |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100 | 53  | 100 | 0  | 0    | 53  | 143 |

|   |        |        |          |        |   |  |     |     |     |      |      |     |     |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
|   |        |        |          |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                      | 100 | 1   | 100 | 0    | 0    | 1   | 1   |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>9 | 1<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                      | 100 | 24  | 100 | 0    | 0    | 24  | 24  |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>2 |          |        | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | <b>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup</b>               | 100 | 100 | 100 | 0,25 | 0,25 | 100 | 100 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>2 | 2.0<br>1 |        | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH</b>                                | 100 | 100 | 100 | 0,25 | 0,25 | 100 | 100 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>2 | 2.0<br>1 | 0<br>1 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | 2   | 1   | 2   | 0    | 0    | 1   | 50  |

|   |        |        |          |  |  |  |     |     |     |    |    |     |      |
|---|--------|--------|----------|--|--|--|-----|-----|-----|----|----|-----|------|
| 2 | 1<br>1 | 0<br>3 |          |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN<br/>PENCEMARAN DAN/ATAU<br/>KERUSAKAN LINGKUNGAN<br/>HIDUP</b>   | <b>Persentase Pengendalian<br/>Pencemaran Lingkungan Hidup</b>   | 100 | 40  | 100 | 40 | 40 | 80  | 100  |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>3 | 2.0<br>1 |  | <b>Pencegahan Pencemaran<br/>dan/atau Kerusakan<br/>Lingkungan Hidup<br/>Kabupaten/Kota</b>                                    | <b>Persentase Pencegahan<br/>Pencemaran dan Kerusakan<br/>Lingkungan Hidup</b>   | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 100 | 100  |
|   |        |        |          |  | Koordinasi, Singkronisasi dan<br>Pelaksanaan Pengendalian<br>Emisi Gas Rumah Kaca,<br>Mitigasi dan Adaptasi<br>Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Inventarisasi Gas Rumah Kaca<br>dari Sektor Lingkungan Hidup<br>yang Dilaksanakan | 6   | 1   | 2   | 0  | 0  | 1   | 16.6 |
|   |        |        |          |  | Pengelolaan Laboratorium<br>Lingkungan Hidup   | Tercapainya indeks kualitas air  | 6   |     | 2   | 0  | 0  | 1   | 50   |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>3 | 2.0<br>2 |  | <b>Penanggulangan Pencemaran<br/>dan/atau Kerusakan<br/>Lingkungan Hidup<br/>Kabupaten/Kota</b>                                | <b>Persentase Penanggulangan<br/>Pencemaran dan Kerusakan<br/>Lingkungan</b>   | 100 | 100 | 100 | 0  | 0  | 100 | 100  |

|   |        |        |          |        |   |   |     |     |       |       |      |       |       |
|---|--------|--------|----------|--------|---|---|-----|-----|-------|-------|------|-------|-------|
| 2 | 1<br>1 | 0<br>3 | 2.0<br>2 | 0<br>1 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 3   | 2   | 1     | 0     | 0    | 2     | 66    |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>3 | 2.0<br>2 | 0<br>3 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                    | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan                                | 6   | 0   | 1     | 0     | 0    | 0     | 181,2 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>4 |          |        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                     | <b>Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan</b>                                    | 20  | 18  | 18,19 | 0,32  | 1,76 | 18,32 | 100   |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>4 | 2.0<br>1 |        | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                       | <b>Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>  | 100 | 100 | 100   | 0,32  | 0,32 | 100   | 100   |
|   |        |        |          |        | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota  | 24  | 1   | 8     | 11,75 | 147  | 12,75 | 42,2  |
|   |        |        |          |        | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya   | Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 3   | 0   | 1     | 0     | 0    | 0     | 0     |

|   |        |        |          |        |   |  |     |     |      |    |     |     |     |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|
| 2 | 1<br>1 | 0<br>5 |          |        | <b>PROGRAM PENGENDALIAN<br/>BAHAN BERBAHAYA DAN<br/>BERACUN (B3) DAN LIMBAH<br/>BAHAN BERBAHAYA DAN<br/>BERACUN (LIMBAH B3)</b> | <b>Persentase Pengurangan<br/>Limbah Bahan Berbahaya dan<br/>Beracun (B3)</b>  | 100 | 100 | 30   | 49 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>5 | 2.0<br>1 |        | <b>Penyimpanan Sementara<br/>Limbah B3</b>  | <b>Persentase Jumlah Usaha<br/>Yang Memiliki Izin<br/>Penyimpanan Sementara<br/>Limbah B3</b>  | 100 | 100 | 0,25 | 25 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>5 | 2.0<br>1 | 0<br>1 | Verifikasi Lapangan untuk<br>memastikan Pemenuhan<br>Persyaratan Administrasi dan<br>Teknis Penyimpanan<br>Sementara Limbah B3  | Jumlah Laporan Kegiatan<br>Verifikasi Lapangan<br>Pemenuhan Komitmen<br>Persetujuan/Izin Penyimpanan<br>sementara dan Pengumpulan<br>Limbah B3 | 15  | 4   | 5    | 0  | 0   | 4   | 26  |

|   |        |        |          |        |   |  |     |     |     |    |     |     |     |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 2 | 1<br>1 | 0<br>5 | 2.0<br>1 |        | <b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah</b>  | 100 | 100 | 100 | 24 | 24  | 100 | 100 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>5 | 2.0<br>1 | 0<br>2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 15  |     | 5   | 3  | 0,6 | 3   | 20  |

|   |        |        |          |        |   |  |     |     |     |    |    |     |     |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 2 | 1<br>1 | 0<br>6 |          |        | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                        | <b>Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</b> | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 100 |
|   | 1<br>1 | 0<br>6 | 2.0<br>1 |        | <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin</b>  | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>6 | 2.0<br>1 | 0<br>1 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH   | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan   | 56  |     | 24  | 0  | 0  | 0   | 0   |

|   |        |        |          |        |   |  |     |     |     |    |      |     |      |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|-----|-----|-----|----|------|-----|------|
| 2 | 1<br>1 | 0<br>6 | 2.0<br>1 | 0<br>3 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 150 | 36  | 50  | 11 | 0,31 | 47  | 1,31 |
| 2 | 1<br>1 |        |          |        | <b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>            | <b>Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>   | 100 | 100 | 100 | 45 | 45   | 100 | 100  |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>7 | 2.0<br>1 |        | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                    | Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH                           | 100 | 100 | 100 | 45 | 45   | 100 | 100  |

|   |        |        |          |        |  |   |     |     |     |     |     |     |     |
|---|--------|--------|----------|--------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | 1<br>1 | 0<br>7 | 2.0<br>1 | 0<br>1 | Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 3   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>9 |          |        | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>   | <b>Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup</b>  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>9 | 2.0<br>1 |        | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup</b>  | 100 | 100 | 100 | 0   | 0   | 100 | 100 |
| 2 | 1<br>1 | 0<br>9 | 2.0<br>1 | 0<br>1 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia  | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang   | 48  | 16  | 5   | 0   | 0   | 100 | 50  |

|   |        |        |          |        |  |  |     |     |     |    |       |     |     |  |
|---|--------|--------|----------|--------|--|--|-----|-----|-----|----|-------|-----|-----|--|
|   |        |        |          |        | Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penelolan Lingkungan Hidup  | Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH   |     |     |     |    |       |     |     |  |
| 2 | 1<br>1 | 1<br>0 |          |        | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | <b>Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti</b>                      | 100 | 100 | 100 | 48 | 48    | 100 | 100 |  |
| 2 | 1<br>1 | 1<br>0 | 2.0<br>1 |        | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan</b>                         | 100 | 100 | 60  | 48 | 80    | 100 | 100 |  |
| 2 | 1<br>1 | 1<br>0 | 2.0<br>1 | 0<br>1 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota  | Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan | 15  | 0   | 10  | 7  | 0,7   | 7   | 46  |  |
| 2 | 1<br>1 | 1<br>1 |          |        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   | <b>Peresentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota</b>                  | 100 | 70  | 73  | 45 | 61,64 | 100 | 100 |  |

| 2 | 1<br>1 | 1<br>1 | 2.0<br>1 |        | Pengelolaan Sampah   | Persentase Pengelolaan Sampah   | 100 | 100 | 72 | 45 | 62,5 | 100 | 100  |
|---|--------|--------|----------|--------|--|---|-----|-----|----|----|------|-----|------|
| 2 | 1<br>1 | 1<br>1 | 2.0<br>1 | 0<br>2 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali  | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali                        | 24  | 0   | 1  | 6  | 0,67 | 6   | 33,3 |
| 2 | 1<br>1 | 1<br>1 | 2.0<br>1 | 0<br>3 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                            | 74  | 0   | 24 | 0  | 0    | 0   | 0,22 |
| 2 | 1<br>1 | 1<br>1 | 2.0<br>1 | 0<br>7 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota   | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 4   | 3   | 0  | 0  | 0    | 3   | 75   |

## **2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Partisipasi/minat atau kesadaran masyarakat rendah akan pentingnya kebersihan lingkungan
2. Kapasitas TPA sudah over
3. Terjadi Hambatan Aliran Air Buangan pada Saluran Drainase Sampah, Gulma dan Sedimen yang menghambat aliran air buangan sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat
4. Sosialisasi tentang kriteria penilaian adipura
5. Partisipasi masyarakat masih rendah dalam program penanaman pohon
6. Kurangnya tokoh masyarakat yang mengetahui hukum adat dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
7. Penguatan Kelembagaan Berbasis Lingkungan Hidup (ADIWIYATA)

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk tahun 2023 program dan kegiatan berdasarkan pada RPJMD Perubahan 2019-2023 dan Rencana Kerja serta Pendanaan Daerah Tahun Anggaran 2023 di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel III.I adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Dinas Lingkungan Hidup adalah :**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- e. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- j. Program Pengelolaan Persampahan

##### **2. Kegiatan**

Untuk menunjang Program yang telah ditentukan maka Dinas Lingkungan Hidup merencanakan kegiatan yang terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

##### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
  - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
  - a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
  - a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

**c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - b) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
- 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
  - b) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

**d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

- 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
  - a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - b) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

**e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

- 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
  - a) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 2) Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a) Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
  - b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**

- 1) Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
  - a) Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

**h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

- 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

- 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
  - a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

**j. Program Pengelolaan Persampahan**

- 1) Pengelolaan Sampah
  - a) Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali
  - b) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
  - c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

**Tabel III.1.**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | TAHUN ANGGARAN 2022 |                        |                               |                           |                   |                        |                               |                           |
|------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|      |   |                                      | SEBELUM PERUBAHAN   |                        |                               |                           | SETELAH PERUBAHAN |                        |                               |                           |
|      |   |                                      | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Kelompok Penerima Manfaat | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Kelompok Penerima Manfaat |
| 1    | 2   | 3                                    | 4                   | 5                      | 6                             | 7                         | 8                 | 9                      | 10                            |                           |
| 2    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                      |                     |                        |                               |                           |                   |                        |                               |                           |

|   |   |   |    |   |  |  |  |              |                           |                                  |  |              |                           |                                   |
|---|---|---|----|---|--|--|--|--------------|---------------------------|----------------------------------|--|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 2 | 1 | 1 |    |   | <b>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>BIDANG LINGKUNGAN<br/>HIDUP</b>                     |  |  |              |                           |                                  |  |              |                           |                                   |
| 2 | 1 | 0 |    |   | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | <b>Cakupan<br/>ketersediaan<br/>pelayanan<br/>administrasi<br/>penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan</b> | <b>Kab.Side<br/>nreng<br/>Rappang<br/>, Semua<br/>Kecamat<br/>an,<br/>Semua<br/>Keluraha<br/>n</b> | <b>100%</b>  | <b>4.504.625.6<br/>00</b> |                                  |  | <b>100%</b>  | <b>4.562.500.6<br/>00</b> |                                   |
| 2 | 1 | 0 | 2. |   | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b> | <b>Tersedianya<br/>Dokumen<br/>perencanaan<br/>yang di hasilkan</b>                                      |  | 100%         | 51.770.100                |                                  |  | 100%         | 48.259.100                | ASN Dinas<br>Lingkunga<br>n Hidup |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                              | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah  | Kab.Side<br>nreng<br>Rappang<br>, Semua<br>Kecamat<br>an,<br>Semua<br>Keluraha<br>n                | 4<br>Dokumen | 20.000.000                | ASN Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup | Kab.Side<br>nreng<br>Rappang,<br>Semua<br>Kecamat<br>an,<br>Semua<br>Keluraha<br>n | 4<br>Dokumen | 20.000.000                |                                   |

|   |   |   |    |   |  |  |   |           |           |                            |  |           |           |  |
|---|---|---|----|---|--|--|---|-----------|-----------|----------------------------|--|-----------|-----------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 2.500.000 | ASN Dinas Lingkungan Hidup | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 2.500.000 |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Dokumen | 2.500.000 | ASN Dinas Lingkungan Hidup | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Dokumen | 2.500.000 |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD           | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 2.500.000 | ASN Dinas Lingkungan Hidup | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 2.500.000 |  |

|   |   |   |    |   |   |  |   |           |               |                            |  |           |               |                            |
|---|---|---|----|---|---|--|---|-----------|---------------|----------------------------|--|-----------|---------------|----------------------------|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Dokumen | 4.270.100     | ASN Dinas Lingkungan Hidup | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Dokumen | 4.270.100     |                            |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Laporan | 20.000.000    | ASN Dinas Lingkungan Hidup | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Laporan | 16.489.000    |                            |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Presentase Laporan Administrasi Keuangan</b>  |   | 100%      | 3.638.923.500 | ASN Dinas Lingkungan Hidup |  | 100%      | 3.638.923.500 | ASN Dinas Lingkungan Hidup |

|   |   |   |    |   |   |  |   |                 |               |                            |  |                 |               |  |
|---|---|---|----|---|---|--|---|-----------------|---------------|----------------------------|--|-----------------|---------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 560 Orang/Bulan | 3.606.928.000 | ASN Dinas Lingkungan Hidup | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 560 Orang/Bulan | 3.606.928.000 |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Laporan       | 8.359.500     | ASN Dinas Lingkungan Hidup | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Laporan       | 8.359.500     |  |

|   |   |   |    |   |   |  |   |            |             |                            |  |            |             |                            |
|---|---|---|----|---|---|--|---|------------|-------------|----------------------------|--|------------|-------------|----------------------------|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 Laporan | 23.636.000  | ASN Dinas Lingkungan Hidup | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 Laporan | 23.636.000  |                            |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   | 100%       | 215.502.000 | ASN Dinas Lingkungan Hidup |  | 100%       | 215.502.000 | ASN Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7 Paket    | 3.402.000   |                            | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7 Paket    | 3.402.000   |                            |

|   |   |   |    |   |   |   |  |   |            |             |                            |  |            |             |                            |
|---|---|---|----|---|---|---|--|---|------------|-------------|----------------------------|--|------------|-------------|----------------------------|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | 0 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar Daerah                  | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70 Laporan | 212.100.000 |                            | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70 Laporan | 212.100.000 |                            |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | 7 | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>  |   | 100%       | 21.125.000  | ASN Dinas Lingkungan Hidup |  | 100%       | 61.386.000  | ASN Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 1 | 0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Unit     | 21.125.000  |                            | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8 Unit     | 61.386.000  |                            |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | 8 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                          |   | 100%       | 394.360.000 | ASN Dinas Lingkungan Hidup |  | 100%       | 394.360.000 | ASN Dinas Lingkungan Hidup |

|   |   |   |    |   |   |  |   |             |             |  |  |             |             |  |
|---|---|---|----|---|---|--|---|-------------|-------------|--|--|-------------|-------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400 Laporan | 5.000.000   |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400 Laporan | 5.000.000   |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Laporan  | 74.040.000  |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Laporan  | 74.040.000  |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Laporan  | 315.320.000 |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Laporan  | 315.320.000 |  |

| 2 | 1 | 0 | 2. |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah  |   | 100%    | 204.070.000 |  |  | 100%    | 204.070.000 |  |
|---|---|---|----|---|--|--|---|---------|-------------|--|--|---------|-------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Unit  | 42.400.000  |  |  | 1 Unit  | 42.400.000  |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70 Unit | 130.203.000 |  |  | 78 Unit | 130.203.000 |  |

|   |   |   |    |   |  |  |  |   |         |             |            |  |         |             |            |
|---|---|---|----|---|--|--|--|---|---------|-------------|------------|--|---------|-------------|------------|
|   |   |   |    |   |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara        | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Unit  | 15.000.000  |            | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Unit  | 15.000.000  |            |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 1 |  | Pemeliharaan alat dan mesin lainnya                          |  | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28 Unit | 16.467.000  |            | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28 Unit | 16.467.000  |            |
| 2 | 1 | 0 |    |   |  | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                  | <b>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup</b> |   | 100%    | 115.725.000 | Masyarakat |  | 100%    | 615.725.000 | Masyarakat |

|   |   |   |    |   |   |  |   |           |             |  |  |            |             |  |
|---|---|---|----|---|---|--|---|-----------|-------------|--|--|------------|-------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2. |   | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH</b>                                |   | 100%      | 115.725.000 |  |  | 100 Persen | 115.725.000 |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 115.725.000 |  |  | 1 Dokumen  | 115.725.000 |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. |   | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>      | <b>Persentase Penyelenggaraa n KLHS</b>  |   | 100%      | 170.000.000 |  |  | 100 Persen | 500.000.000 |  |
|   | 1 | 0 | 2. | 0 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang                                   | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang   | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 170.000.000 |  |  | 1 Dokumen  | 170.000.000 |  |

|   |   |   |    |   |   |   |   |           |             |  |  |           |             |  |
|---|---|---|----|---|---|---|---|-----------|-------------|--|--|-----------|-------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD  | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun                               | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Dokumen | 330.000.000 |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 Dokumen | 330.000.000 |  |
| 2 | 1 | 0 |    |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</b>                                |   | 60%       | 122.959.600 |  |  | 60%       | 90.709.600  |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>                    |   | 100%      | 80.000.000  |  |  | 100%      | 48.594.000  |  |
|   |   |   |    |   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua           | 2 Dokumen | 20.000.000  |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua           | 2 Dokumen | 20.000.000  |  |

|   |   |   |    |  |  |   |  |  |           |            |           |                  |            |
|---|---|---|----|--|--|---|--|--|-----------|------------|-----------|------------------|------------|
|   |   |   |    |  |  | Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan  | Kelurahan  |  |           |            | Kelurahan |                  |            |
|   |   |   |    |  |  | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup   | Tercapainya indeks kualitas air                                      | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Dokumen | 60.000.000 |           | 2 Kali/Pengujian | 28.594.000 |
| 2 | 1 | 0 | 2. |  |  | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b> |  | 100%      | 42.959.600 |           | 100%             | 42.115.600 |

|   |   |   |    |   |   |   |   |            |               |  |  |            |               |  |
|---|---|---|----|---|---|---|---|------------|---------------|--|--|------------|---------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11 laporan | 20.000.000    |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11 Laporan | 21.612.500    |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                    | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan                                | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11 Titik   | 22.959.600    |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11 Titik   | 20.503.100    |  |
| 2 | 1 | 0 |    |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                     | <b>Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan</b>                                    |   | 20%        | 1.484.781.600 |  |  | 20%        | 1.484.781.600 |  |

|   |   |   |    |   |   |   |          |               |  |  |          |               |  |
|---|---|---|----|---|---|---|----------|---------------|--|--|----------|---------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2. | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>                  |   | 100%     | 1.484.781.600 |  |  | 100%     | 1.484.781.600 |  |
|   |   |   |    | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                   | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47 Ha    | 1.462.712.100 |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47 Ha    | 1.462.712.100 |  |
|   |   |   |    | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya         | Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 Lokasi | 22.069.500    |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Lokasi | 22.069.500    |  |

|   |   |   |    |  |   |   |  |           |            |  |  |           |            |  |
|---|---|---|----|--|---|---|--|-----------|------------|--|--|-----------|------------|--|
| 2 | 1 | 0 |    |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b> | <b>Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>             | <b>Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b> | 88 Persen | 30.000.100 |  |  | 88 Persen | 30.000.100 |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. |  | <b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>  | <b>Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3</b> | <b>Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b> | 100%      | 5.000.100  |  |  | 100%      | 5.000.100  |  |

|   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |           |            |                |  |           |            |                |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|-----------|------------|----------------|--|-----------|------------|----------------|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Laporan | 5.000.100  |                | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Laporan | 5.000.100  |                |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | <b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah</b>   |   | 100%      | 25.000.000 | Usaha/Kegiatan |  | 100%      | 25.000.000 | Usaha/Kegiatan |



|   |   |   |    |  |   |  |  |      |            |  |  |      |            |  |
|---|---|---|----|--|---|--|--|------|------------|--|--|------|------------|--|
| 2 | 1 | 0 |    |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                        | <b>Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</b> |  | 100% | 45.000.000 |  |  | 100% | 45.000.000 |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. |  | <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin</b>  |  | 100% | 45.000.000 | Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan |  | 100% | 45.000.000 | Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan |

|   |   |   |    |   |   |  |   |            |            |  |  |            |            |  |
|---|---|---|----|---|---|--|---|------------|------------|--|--|------------|------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH   | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                                       | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Dokumen | 20.000.000 |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Dokumen | 20.000.000 |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35 Laporan | 25.000.000 |  |  | 35 Laporan | 25.000.000 |  |

|   |   |   |    |  |  |   |  |      |            |            |  |      |            |                |
|---|---|---|----|--|--|---|--|------|------------|------------|--|------|------------|----------------|
| 2 | 1 | 0 |    |  | <b>PROGRAM<br/>PENGAKUAN<br/>KEBERADAAN<br/>MASYARAKAT HUKUM<br/>ADAT (MHA),<br/>KEARIFAN LOKAL DAN<br/>HAK MHA YANG<br/>TERKAIT DENGAN<br/>PPLH</b> | <b>Cakupan<br/>Pengakuan<br/>Keberadaan<br/>MHA, Kearifan<br/>Lokal dan Hak<br/>MHA yang<br/>Terkait dengan<br/>PPLH</b>  | <b>Jumlah<br/>Dokume<br/>n Hasil<br/>Koordin<br/>asi dan<br/>Sinkroni<br/>sasi<br/>Pengawa<br/>san dan<br/>Penerap<br/>an<br/>Sanksi<br/>Upaya<br/>dan<br/>Rencana<br/>PPLHD</b> | 100% | 15.000.000 |            |  | 100% | 15.000.000 |                |
| 2 | 1 | 0 | 2. |  | <b>Pengakuan MHA,<br/>Kearifan Lokal,<br/>Pengetahuan<br/>Tradisional, dan Hak<br/>MHA yang terkait<br/>dengan PPLH</b>                              | <b>Cakupan data<br/>dan informasi<br/>tentang<br/>pengakuan<br/>MHA, Kearifan<br/>lokal,<br/>pengetahuan<br/>tradisional dan<br/>hak MHA yang<br/>terkait dengan<br/>PPLH</b> |  | 100% | 15.000.000 | Masyarakat |  | 100% | 15.000.000 | Masyarak<br>at |

|   |   |   |    |   |  |   |   |           |            |  |  |           |            |  |
|---|---|---|----|---|--|---|---|-----------|------------|--|--|-----------|------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 15.000.000 |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 15.000.000 |  |
| 2 | 1 | 0 |    |   | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>   | <b>Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup</b>  |   | 100%      | 74.937.500 |  |  | 100%      | 74.937.500 |  |

|   |   |   |    |   |  |  |   |           |            |  |  |           |            |  |
|---|---|---|----|---|--|--|---|-----------|------------|--|--|-----------|------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2. |   | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup</b>   |   | 100%      | 74.937.500 |  |  | 100%      | 74.937.500 |  |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Entitas | 74.937.500 |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Entitas | 74.937.500 |  |
| 2 | 1 | 1 |    |   | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | <b>Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti</b>  |   | 60%       | 25.000.000 |  |  | 60%       | 25.000.000 |  |

|   |   |   |    |   |  |   |   |            |               |            |            |               |            |
|---|---|---|----|---|--|---|---|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| 2 | 1 | 1 | 2. |   | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan</b>  |   | 100%       | 25.000.000    | Masyarakat | 100%       | 25.000.000    | Masyarakat |
| 2 | 1 | 1 | 2. | 0 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota  | Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan                | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Dokumen | 25.000.000    |            | 10 Dokumen | 25.000.000    |            |
| 2 | 1 | 1 |    |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   | <b>Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani</b> |   | 72,50%     | 7.034.077.600 |            | 72,50%     | 7.029.577.600 |            |

| 2 | 1 | 1 | 2. |   | Pengelolaan Sampah   | Persentase Pengelolaan Sampah  |   | 100%       | 7.034.077.600 |  |  | 100%       | 7.029.577.600 |  |
|---|---|---|----|---|--|--|---|------------|---------------|--|--|------------|---------------|--|
| 2 | 1 | 1 | 2. | 0 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali  | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9 Laporan  | 1.695.390.700 |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.529 Ton | 1.676.259.700 |  |
| 2 | 1 | 1 | 2. | 0 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota     | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.410 Ton | 3.673.992.900 |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.410 Ton | 3.688.623.900 |  |

|   |   |   |    |   |   |  |   |   |         |               |  |  |        |               |  |
|---|---|---|----|---|---|--|---|---|---------|---------------|--|--|--------|---------------|--|
| 2 | 1 | 1 | 2. | 0 | 0 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Unit | 1.664.694.000 |  | Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 Unit | 1.664.694.000 |  |
|---|---|---|----|---|---|--|---|---|---------|---------------|--|--|--------|---------------|--|

## **BAB IV P E N U T U P**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2023 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD.

Perubahan rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan bidang Lingkungan Hidup sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Rencana kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang. Adapun rencana kerja ini apabila masih ada kekurangan maka saran dan masukan dari semua pihak senantiasa kami harapkan.

Pangkajene Sidenreng, 17 Juli 2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG., MT**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip 19690507 199903 1 010